

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

AAksi Sinurat. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*.

Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Cendana.

Bambang Waluyo. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiman, M. (2021). *Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: PT Cita

Intrans Selaras.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. (2022). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Eddy O.S, H. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*,. Yogyakarta:

Cahaya Atma Pustaka.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: PT Rajawali Press.

K. Larasati. (2024). *PANCASILA: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*. Jakarta:

CV. Intelektual Manifes Media.

Kristian, Y. G. dan. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara*

Hukum Pancasila. Bandung: PT Refika Aditama.

Pasaribu, M. &. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta:

LPPMUHN Press.

Putri. (2022). *Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh*

(Analisis Putusan Nomor 587/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Pst). Fakultas

Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Saleh, R. (2018). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:

Politea.

Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo

Persada.

Sidharta, B. (2016). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka*

Berfikir. Bandung: Refika Aditama.

Sudikno Mertokusumo. (2018). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.

Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Wibowo. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Disekolah*

(Konsep, Strategi, dan Implementasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirjono Prodjodikoro. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung:

Sumur Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Abdul Lalelorang. (2015). Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan.

Lex Crimen, 3(1).

Ardi Ferdian. (2025). Perbedaan Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran. Retrieved July 21, 2025, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dan-pelanggaran-lt5971008e81638/>

Arifin, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12).

Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023). Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana. Retrieved July 21, 2025, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/>

Chant S. R. Ponglabba. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, VI(6).

Dan, I. A. K., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2).

Erika Henidar Utami. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pembantu Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Pt. Gita Omega Distrindo (Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2021/Pn.Tjk)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*,

7(1), 12.

Hartono, B., & Aprinisa Ranata, M. B. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 246.

Iman Teguh Santoso. (2023). Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1).

Kurniawan, N. (2019). Kriminologi. Retrieved July 4, 2023, from pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi%0Adalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.

Leonardo O. A. Pandensolang. (2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen, IV*(Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015), 24.

Safitri, Ss, Ardiansah, Md, & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perkara Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Terhadap Pasal 23 Uu Tpks). *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wara Sains*, 20(1).

Sianturi. (2018, June 4). Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana. Retrieved September 8, 2022, from <https://litigasi.co.id/posts/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>

Surinta, T. (2018). Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum. Retrieved from <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara->

teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis
atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan
kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen

Tampubolon, M. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman
(Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia).
Yurispruden, 5(2).